

PENGARUH KARAKTERISTIK DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

THE EFFECT OF THE REGIONAL CHARACTERISTIC AND AUDIT OPINION ON THE LEVEL OF FINANCIAL STATEMENT DISCLOSURE IN LOCAL GOVERNMENT

A.Salfadhilah, M.Sumardjo, S.Y. Wijaya

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

salfadhilahalma@gmail.com, mahendro@upnvj.ac.id, satria.wijaya@upnvj.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of regional wealth, regional depend, total assets, and audit opinion. In this research, the population is the district/city on Kalimantan Island during the period 2015 to 2019. This research used the Purposive Sampling and testing the hypothesis was through multiple linear regression using SPSS. The test results obtained that the regional wealth negatively significant, regional depend did not significant affect, total assets has a significant positif, and audit opinion has a significant positive on the level of LKPD disclosure.

Key words: audit opinion, level of LKPD disclosur, regional wealth, regional depend, total assets.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, ketergantungan daerah, total aset, dan opini audit. Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 dijadikan populasi. Metode penelitian menggunakan Purposive Sampling dan pengujian hipotesis dengan regresi linear berganda pada program SPSS. Hasil yang diperoleh membuktikan bila kekayaan daerah berpengaruh signifikan negatif, ketergantungan daerah tidak berpengaruh signifikan, total aset, dan opini audit mempengaruhi signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Kata kunci: opini audit, kekayaan daerah, ketergantungan daerah, total aset, dan tingkat pengungkapan LKPD.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan langkah untuk mewujudkan desentralisasi pemerintah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan agar daerah mempunyai hak dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Menurut Nurlianto & Aswar (2020), pengungkapan dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi yang memberikan informasi keuangan entitas. Jenis pengungkapan terbagi menjadi pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela yang akan dimuat dalam CaLK. Item pengungkapan wajib disajikan berdasarkan *Government Compliance Index (GCI)*. Berdasarkan data dari website www.bpk.go.id pada IHPS tahun 2020, dalam tahun 2015-2019 perolehan opini pada daerah di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 32%. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2015 yang hanya memperoleh WTP 58% naik menjadi 90% pada tahun 2019.

Dalam penelitian ini, karakteristik daerah terbagi menjadi tiga. Indikator karakteristik daerah yang pertama yaitu kekayaan daerah dapat diproksikan dengan PAD. Pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan adalah bagian dari PAD. Kedua yaitu ketergantungan daerah dimana pembiayaan kegiatan operasional suatu daerah masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. BPK RI menemukan rata-rata Indeks Kemandirian Fiskal kabupaten/kota sebesar 11% dengan 1 kabupaten mencapai level sangat mandiri. Ketiga yaitu total aset yang merupakan kepemilikan jumlah sumberdaya yang dimiliki oleh suatu entitas untuk pembiayaan kegiatan operasionalnya (Kusuma et al, 2021) dan diharapkan dapat memiliki manfaat untuk masa depan. Pencatatan aset tetap atau barang milik negara telah diatur dalam PP No.6 Tahun 2006 serta PP No.17 Tahun 2007.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belum terdapatnya daerah yang melakukan pengungkapan secara penuh sesuai SAP yang berlaku. Dalam penelitian Hilmi & Martani (2012) dengan sampel LKPD Provinsi tahun 2006-2009 sebesar 44,56%, Hendriyani & Tahar (2015) dengan sampel LKPD Provinsi tahun 2012-2014 sebesar

41,76%, Setyowati (2016) dengan sampel LKPD tahun 2014 sebesar 64%, Kusuma et al. (2021) dengan sampel LKPD Pulau Jawa sebesar 80,58%, serta Marsella & Aswar (2019) dengan menggunakan sampel LKPD Pulau Sumatra sebesar 82,7%.

Agency Theory

Agency Theory yaitu kaitan yang terjadi antara prinsipal atas agen yang dipekerjakan untuk memberikan suatu jasa dan menjalankan wewenang keputusan dari *principal*. Dengan adanya hubungan tersebut, seringkali menimbulkan permasalahan karena adanya asimetris informasi dan konflik kepentingan. Teori keagenan pada sektor publik berhubungan dengan tiga pihak yaitu auditor, auditee, dan publik (Arens, 2017 hlm. 96). Menurut Priharjanto & Wardani (2017) terdapat beberapa konflik yang mungkin terjadi dalam pemerintahan, salah satunya yaitu ketika pemerintahan berjalan dengan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan rakyat.

Signalling Theory

Signalling Theory atau teori sinyal merupakan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk memberikan sinyal atau tanda kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pemerintah akan memberikan sinyal atau tanda atas pengungkapan informasi laporan keuangan kepada publik sebagai pengguna. Pemerintah memerlukan dukungan dari masyarakat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Maka dari itu, pemerintah harus menyampaikan sinyal baik kepada masyarakat (Hilmi & Martani, 2012).

Tingkat Pengungkapan LKPD

Pengungkapan adalah suatu bentuk transparansi yang dilakukan oleh entitas kepada publik dengan menyajikan informasi atas kegiatan yang dilakukan. Menurut Setyaningrum & Syafitri (2012) adalah membandingkan butir kesesuaian antara jumlah item yang disajikan dengan item yang wajib disajikan dalam CaLK sesuai SAP yang berlaku.

Kekayaan Daerah

PAD dapat diproksikan untuk menghitung dan menggambarkan kekayaan daerah yang dimiliki oleh suatu daerah. Menurut Priharjanto & Wardani (2017). PAD terdiri

dari pendapatan yang berasal dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta yang lainnya PAD sah.

Ketergantungan Daerah

Ketergantungan daerah dapat digambarkan dengan besaran pendapatan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan operasional daerahnya diluar pendapatan asli yang dihasilkan (Khasanah & Rahardjo, 2014)

Total Aset

Menurut Ruserlistyani & Heriningsih (2013) yaitu sumber daya ekonomi yang bermanfaat hingga masa kini akibat dari peristiwa masa lampau.

Opini Audit

Opini audit yaitu kesimpulan hasil pemeriksaan LKPD yang dilakukan oleh auditor independen atas informasi yang dimuat dalam laporan keuangan (Naopal *et al.*, 2017).

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Apabila besaran total kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah tinggi, maka tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintah semakin besar untuk melakukan pengungkapan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Jika dihubungkan dengan teori keagenan, terjadi keterkaitan antara pemda dengan publik. Agen diperankan oleh pemerintah dan prinsipal diperankan oleh masyarakat. Pemda diberi tanggung jawab oleh masyarakat dalam melakukan pengelolaan atas sumber daya yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah. Maka dari itu, pemda harus berusaha menunjukkan tanggung jawab atas kinerja dan pengelolaan kekayaan kepada warga yang berhak menerima data pengungkapan yang disajikan memiliki hak untuk menerima informasi pengungkapan yang disajikan. penelitian Hilmi & Martani (2012) kekayaan daerah mempengaruhi signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD sebab semakin besar tingkat kekayaan daerah, semakin tinggi juga tekanan yang dimiliki oleh pemda untuk melakukan pengungkapan LKPD. Maka hipotesis yang dibangun yaitu:

H₁: Kekayaan daerah mempengaruhi signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Pengaruh Ketergantungan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Ketergantungan daerah berhubungan dengan teori sinyal, dimana terjadi keterkaitan antara pemda dengan pemerintah pusat. Pemda dapat memberikan sinyal kepada pemerintah pusat sebagai suatu cara untuk menginformasikan tanggungjawab penggunaan dan pengelolaan dana transfer yang diberikan kepada pemda. Selain itu, cara pemberian sinyal juga dapat dilakukan untuk menginformasikan tentang kemandirian daerahnya dalam membiayai kegiatan operasional serta belanja daerah dengan menggunakan sumber dana yang dimiliki diluar bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Riset Priharjanto & Wardani (2017) merumuskan apabila ketergantungan daerah mempengaruhi signifikan positif terhadap pengungkapan LKPD sebab banyaknya bantuan yang didapat menjadikan pemerintah pusat hendak mendesak pemerintah pusat agar memonitor pengelolaan dana. Sehingga, hipotesis yang dibentuk ialah: H₂: Ketergantungan daerah mempengaruhi signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Pengaruh Total Aset terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Pengelolaan total aset dapat dikaitkan dengan teori keagenan, dimana terjadi keterkaitan antara pemda, pemerintah pusat, dan masyarakat. Pemda berperan sebagai agen dimana akan mempertanggungjawabkan pengelolaan aset yang dimilikinya kepada pemerintah pusat sebagai prinsipal. Apabila pemda dapat melakukan manajemen pencatatan yang baik, maka dapat melakukan penyajian pengungkapan yang baik dan detail untuk dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan juga masyarakat. Khasanah & Rahardjo (2014) total aset mempengaruhi signifikan positif terhadap tingkatan pengungkapan LKPD sebab besaran yang dimiliki oleh suatu pemda maka terdapat kemungkinan yang besar untuk mewujudkan

pengungkapan secara detail dan kompleks yang disajikan. maka hipotesis yang dibangun yaitu:

H₃: Total aset mempengaruhi signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Opini audit dapat dikaitkan dengan teori sinyal, dimana pemda akan memberikan sinyal kepada auditor yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan. Apabila suatu daerah dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar maka akan memperoleh opini yang bebas dari kesalahan material. Semakin besar skor opini audit yang diperoleh maka membuktikan semakin besar tingkat pengungkapan yang disajikan dalam LKPD (Priharjanto & Wardani, 2017).

Penelitian Naopal *et al.* (2017) apabila LKPD yang diperiksa oleh BPK mendapatkan opini yang baik maka pelaporan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan baik dan cenderung tidak menutupi informasi transaksi yang dilakukan. Maka hipotesis yang dibangun yaitu:

H₄: Opini audit mempengaruhi signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

METODE PENELITIAN

Unit Analisa dan Sampel

Riset ini adalah kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari LKPD lewat permintaan informasi pada *website* www.e-ppid.bpk.go.id atau situs resmi pemda. Populasi pada riset penelitian ini yaitu LKPD di Pulau Kalimantan periode 2015-2019.

Tabel 1 Pemilihan Sampel Penelitian

| Kriteria Sampel Penelitian | Total |
|--|-------|
| LKPD <i>audited</i> yang berada di Pulau Kalimantan tahun 2015-2019. | 61 |
| LKPD Provinsi yang berada di Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 | (5) |
| LHP yang tidak menerbitkan LKPD secara lengkap dan berurut | (1) |
| Jumlah Sampel | 55 |
| Tahun Pengamatan | 5 |
| Jumlah Sampel Sebelum <i>Outlier</i> | 275 |
| Sampel Terkena <i>Outlier</i> | (80) |
| Sampel Akhir Penelitian | 195 |

Sumber: data diolah (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Data Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|---------|----------|----------------|
| DISC | 195 | 0.400 | 0.860 | 0.65405 | 0.104465 |
| WEALTH | 195 | 23.642 | 26.889 | 25.21499 | 0.574670 |
| DEPEND | 195 | 0.173 | 0.683 | 0.48696 | 0.103856 |
| TA | 195 | 27.840 | 29.476 | 28.59730 | 0.378125 |
| OPINI | 195 | 3.000 | 4.000 | 3.93846 | 0.240934 |
| Valid N (listwise) | 195 | | | | |

Sumber: hasil output IBM SPSS

Berdasarkan hasil tabel statistik deskriptif diatas, tingkat pengungkapan LKPD memperoleh nilai standar deviasi 0.104465 dengan nilai min sebesar 0.400. Sedangkan

nilai maks yang dimiliki pada variabel tingkat pengungkapan LKPD adalah sebesar 0,860. Pada nilai *mean* variabel ini menunjukkan nilai sebesar 0.65406 yang dapat dikategorikan

rendah karena lebih kecil dari standar yang ditentukan yaitu sebesar 2.33 ($0.65406 < 2.33$).

Bersumber pada tabel statistik deskriptif, kekayaan daerah mendapatkan nilai standar deviasi sebesar 0.574670 serta nilai min sebesar 23.642. Sedangkan untuk nilai maks pada variabel ini yaitu sebesar 26.889. Pada nilai *mean* variabel kekayaan daerah menunjukkan nilai sebesar 25.21499 yang dapat dikategorikan tinggi karena lebih besar dari standar yang ditentukan yaitu 3.67 ($25.21499 > 3.67$). Maka dari itu, kekayaan daerah pada kabupaten/kota di Pulau Kalimantan dapat dikategorikan tinggi.

Berdasarkan hasil tabel statistik deskriptif, ketergantungan daerah memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0.103856 dan nilai min sebesar 0.173. Sedangkan untuk nilai maks pada variabel ini yaitu sebesar 0.683. Pada nilai *mean* variabel ketergantungan daerah menunjukkan nilai sebesar 0.48696 yang dapat dikategorikan rendah karena lebih kecil dari standar yang ditentukan sebesar 2.33 ($0.48696 < 2.33$). Maka dari itu,

ketergantungan daerah pada kabupaten/kota di Pulau Kalimantan dapat dikategorikan rendah.

Berdasarkan hasil tabel statistik deskriptif, variabel total aset memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0.378125 dengan nilai min sebesar 27.840. Sedangkan untuk nilai maks pada variabel ini yaitu sebesar 29.476. Pada nilai *mean* variabel ini menunjukkan skor sebesar 28.597730 yang dapat dikategorikan tinggi karena lebih besar dari standar yang ditentukan sebesar 3.67 ($28.597730 > 3.67$). Maka dari itu, total aset kabupaten/kota di Pulau Kalimantan dapat dikategorikan tinggi.

Berdasarkan hasil tabel statistik deskriptif, opini audit memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0.240934 dengan nilai min 3.000. Sedangkan untuk skor maks yang pada variabel ini yaitu sebesar 4.000. Pada nilai *mean* variabel opini audit menunjukkan skor sebesar 3.93846 yang dapat dikategorikan tinggi karena lebih besar dari standar yang ditetapkan yaitu 3.67 ($3.93846 > 3.67$). Maka dari itu, opini audit yang diperoleh tiap kabupaten/kota di Pulau Kalimantan dapat dikategorikan tinggi.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | 195 |
| Normal Paramaters | Mean | 0.0000000 |
| a,b | Std. Deviation | 0.09491199 |
| Most Extreme Differences | Absolute | 0.060 |
| | Positive | 0.052 |
| | Negative | -0.060 |
| Test Statistic | | 0.060 |
| Asymp. Sig (2-tailed) | | 0.089° |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction | | |

Sumber: Hasil output IBM SPSS

Bersumber pada *output* tabel diatas, dapat dilihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) membuktikan nilai 0.089 yang lebih besar dari signifikansi 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

| Coefficients | | | |
|-------------------------|------------|-----------|-------|
| Collinearity Statistics | | | |
| | Model | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | | |
| | WEALTH | 0,748 | 1,336 |
| | DEPEND | 0,734 | 1,362 |
| | TA | 0,686 | 1,458 |
| | OPINI | 0,876 | 1,141 |

a. Dependent Variable: DISC

Sumber: Hasil output IBM SPSS

Bersumber pada *output* diatas dapat diinterpretasikan bahwa nilai toleransi >0,10 dan nilai VIF kurang dari sama dengan 10

sehingga terbebas dari permasalahan multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

| Model Summary | | | | | |
|---------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of The Estimate | Durbin Watson |
| 1 | 0.418 ^a | 0.175 | 0.157 | 0.095906 | 0.885 |

a. Predictors: (Constant), OPINI, DEPEND, WEALTH, TA

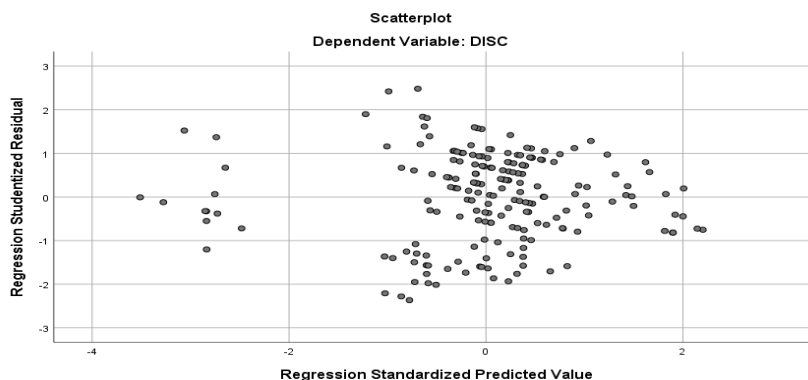
b. Dependent Variable: DISC

Sumber: Hasil *output* IBM SPSS

Bersumber pada *output* diatas yang menunjukkan hasil dari Uji DW dari setiap variabel independen yang dapat menginterpretasikan bahwa data tersebut apakah memiliki gejala autokorelasi atau tidak.

Nilai DW pada tabel tersebut menunjukkan nilai 0,885 yang mana berada dibawah -2 sampai +2 yang dapat diartikan bahwa tidak ada korelasi.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil *output* IBM SPSS

Gambar 1 Hasil Scatterplot

Bersumber pada gambar terlihat penyebaran titik-titik tersebut tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis Uji R Square

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | 0,418 ^a | 0,175 | 0,157 | 0,095906 | 0,885 |

a. Predictors: (Constant), OPINI, DEPEND, WEALTH, TA
b. Dependent Variable: DISC

Sumber: Hasil *output* IBM SPSS

Bersumber pada *output* diatas, nilai Adjusted R Square adalah 0,157 ataupun sebesar 15,7%. Perihal ini membuktikan bahwa tingkat pengungkapan LKPD dapat dipaparkan oleh variabel kekayaan daerah, ketergantungan daerah, total aset, dan opini

audit sebesar 15,7% dari 100%. Sebaliknya, sebesar 84,3% dapat dipaparkan oleh variabel lain diluar riset ini seperti kompleksitas pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan temuan audit.

Uji t

Tabel 7 Hasil Uji t

| Coefficients | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | -0.829 | 0.632 | 0.632 | -1.310 | 0.192 |
| | WEALTH | -0.029 | 0.014 | -0.157 | -2.066 | 0.040 |
| | DEPEND | -0.142 | 0.077 | -0.141 | -1.836 | 0.068 |
| | TA | 0.064 | 0.022 | 0.232 | 2.909 | 0.004 |
| | OPINI | 0.113 | 0.031 | 0.260 | 3.694 | 0.000 |

a. Dependent Variable: DISC

Sumber: Hasil *output* IBM SPSS

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel kekayaan daerah memperoleh skor t hitung sebesar -2,066 ataupun lebih kecil dari t tabel

sebesar 1,652 serta pada perhitungan signifikansinya yakni sebesar $0,040 < 0,05$. Perihal tersebut meyakinkan bahwa kekayaan

daerah mempunyai dampak negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Berikutnya, pada variabel ketergantungan daerah, mendapatkan t hitung sebesar -1,836 ataupun lebih kecil dari t tabel sebesar 1,652. Sebaliknya, untuk perhitungan signifikansinya menunjukkan angka $0,068 > 0,05$. Perihal tersebut berarti bahwa ketergantungan daerah mempunyai dampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Selanjutnya pada variabel total aset membuktikan t hitung sebesar 2,909 ataupun lebih besar dari t tabel sebesar 1,652 serta signifikansinya membuktikan skor $0,004 < 0,05$. Perihal tersebut meyakinkan bahwa total aset mempunyai dampak positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Pada variabel opini audit, t hitung membuktikan skor sebesar 3,694 ataupun lebih besar dari t tabel ialah sebesar 1,652 serta signifikansinya membuktikan angka $0,000 < 0,05$. Perihal tersebut berarti bahwa variabel opini audit mempunyai dampak positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Model Regresi

Berdasarkan tabel Uji Statistik t, model regresi linear berganda dalam riset ini sebagai berikut:

$$DISC = -0,829 + -0,029WEALTH + -0,142DEPEND + 0,064TA + 0,113OPINI$$

Keterangan:

WEALTH : Kekayaan Daerah
DEPEND : Ketergantungan Daerah
TA : Total Aset
OPINI : Opini Audit

Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Bersumber dari uji t membuktikan bahwa kekayaan daerah mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,040 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Pada skor t hitung, variabel kekayaan daerah memiliki skor sebesar -0,157. Artinya, variabel kekayaan daerah pada kabupaten/kota di Pulau Kalimantan memiliki arah yang negatif

terhadap tingkat pengungkapan LKPD sehingga H1 ditolak. Apabila kekayaan daerah meningkat pada tahun berikutnya, maka tingkat pengungkapan akan mengalami penurunan. Sehingga, ketika suatu daerah memiliki kekayaan daerah yang tinggi namun tidak mampu melakukan pengelolaan secara baik, maka akan mengakibatkan pemda tersebut tidak mampu melakukan pengungkapan atas pengelolaan kekayaan daerahnya secara detail.

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan dimana semakin tingginya kekayaan daerah yang dimiliki maka semakin tinggi juga tanggungjawab yang harus dijalankan oleh pemda. Apabila suatu daerah tidak mampu melakukan pengelolaan atas keuangan daerahnya dan tidak mampu melakukan pengungkapan sesuai SAP yang berlaku maka pemda tersebut dapat dinilai kurang mampu dalam menjalankan perintah prinsipal untuk menyajikan pengungkapan pengelolaan keuangan daerahnya. Hasil penelitian selaras dengan penelitian Ramdhani (2016) dan Simbolon & Kurniawan (2018).

Ketergantungan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil uji t ketergantungan daerah mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,068 < 0,05$ serta dengan t hitung sebesar -1,836. Sehingga dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa ketergantungan daerah tidak mempengaruhi signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sehingga H2 ditolak. Artinya, hasil dari riset ini pada kabupaten/kota di Pulau Kalimantan ketergantungan daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sehingga apabila ketergantungan daerah meningkat pada tahun selanjutnya, maka tingkat pengungkapan LKPD yang disajikan belum pasti mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

Hasil riset ini tidak mendukung teori sinyal, dimana diasumsikan bahwa pemda akan memberikan sinyal kepada pemerintah pusat atas pengelolaan dana transfer yang diberikan. Perihal tersebut terjadi karena dalam era desentralisasi, pemerintah pusat tidak memiliki monitoring khusus atas pelaporan keuangan

daerah. Sehingga, bantuan transfer yang akan diberikan kepada pemda dari pemerintah pusat tidak bergantung atas tingkat pengungkapan yang disajikan. Hasil penelitian ini mendukung Hilmi & Martani (2012) yang menyatakan bahwa terdapat pemberian insentif kepada daerah atas pelaporan keuangan, namun hal tersebut tidak bergantung pada kualitas pengungkapannya namun pada pencapaian opini.

Total Aset terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil uji t membuktikan total aset memiliki nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ serta dengan t hitung sebesar 2,909. Sehingga bisa disimpulkan bila total aset mempengaruhi signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD maka H3 diterima. Artinya, hasil dari riset ini pada kabupaten/kota di Pulau Kalimantan total aset mempengaruhi signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sehingga apabila total aset yang dipunyai bertambah, maka tingkat pengungkapan yang akan disajikan juga akan meningkat.

Kepemilikan total aset yang besar cenderung mempunyai ketentuan serta syarat yang lebih banyak dalam pengelolaannya. Sehingga, pemda harus mengungkapkan informasi secara detail dan kompleks atas pengelolaan aset yang dimiliki sesuai dengan SAP yang berlaku. Tingginya total aset yang dimiliki suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki sumber daya ekonomi yang tinggi dan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.

Hasil riset ini menunjang teori keagenan dimana terjalin ikatan antara prinsipal yaitu pemerintah pusat dengan agen yaitu pemda. Semakin besar total aset yang dimiliki suatu daerah sehingga semakin besar tanggungjawab untuk melakukan pengungkapan atas pengelolaan aset sesuai SAP yang berlaku. Agen perlu melakukan manajemen aset yang baik agar mampu menjalankan perintah prinsipal dalam penyajian pengungkapan. Hasil penelitian selaras dengan penelitian Hendriyani & Tahar (2015).

Opini Audit terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil uji t membuktikan nilai signifikansi opini audit sebesar $0,000 < 0,05$ dan t hitung sebesar 3,694. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD sehingga H4 diterima. Artinya, hasil dari penelitian ini pada kabupaten/kota di Pulau Kalimantan memiliki pengaruh positif opini audit pada tingkat pengungkapan LKPD. Sehingga apabila opini audit meningkat pada tahun berikutnya, maka item pengungkapan yang disajikan akan terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Menurut Naopal *et al.* (2017) salah satu kriteria dalam penentuan opini audit adalah kecukupan pengungkapan. Sehingga semakin baik opini audit yang dicapai, maka membuktikan tingkat pengungkapan yang disajikan mencukupi. Hasil riset ini menunjang teori sinyal dimana pemda akan memberikan sinyal yang baik kepada auditor dalam menyajikan pengungkapan sesuai SAP sebagai bukti pendukung dalam proses pemeriksaan. Jika suatu daerah mampu menyajikan laporan keuangan secara detail dan bebas dari salah saji material, maka akan memperoleh opini bebas dari kesalahan material. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Priharjanto & Wardani (2017), Naopal *et al.* (2017), dan Nazaruddin & Sita (2019).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil riset serta pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kekayaan daerah mempengaruhi signifikan negatif, ketergantungan daerah tidak mempengaruhi signifikan, total aset, dan opini audit mempengaruhi signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Pulau Kalimantan periode 2015-2019.

Keterbatasan penelitian ini yaitu objek penelitian hanya menggunakan LKPD di Pulau Kalimantan, terhadap hasil *scan* LHP yang tidak dapat terbaca, dan terdapat LHP yang tidak menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan sesuai dengan syarat dalam penelitian.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan pengaruh sumber daya

manusia, kompleksitas pemda, dan faktor lain yang sekiranya dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan dan menggunakan sampel kabupaten/kota yang berbeda dengan pengukuran yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens. (2017). *Auditing And Assurance Service. An Integratde Approach 14th Edition*. England: Person Education Limited. 96
- Hendriyani & Tahar. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*, 22(1), 25–33.
- Hendriyani & Tahar. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*, 22(1), 25–33.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah *Provinsi*. *Simposium Nasional Akuntansi Xv*, 1–26.
- Khasanah & Rahardjo. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 864–874.
- Kusuma, R. Aswar, K., & Ermawati. (2021). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Suatu Tinjauan Empiris. *Korelasi*, 2, 581–591.
- Marsella, C., & Aswar, K. (2019). *An Investigation Of Financial Statement Disclosure In Local Government Financial Statements*. *International Journal Of Business And Economic Affairs*, 4(5), 254–263. <https://doi.org/10.24088/ijbea-2019-45005>
- Naopal, F., Rahayu, S., Yudowati, & Priyandani, S. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Assets*, 7(1), 56–68.
- Nazaruddin, I., & Sita, Y. Y. A. (2019). *The Effects Of Government Characteristics, Complexity, Audit Findings, And Audit Opinions On The Level Of Provincial Government Financial Statement Disclosures In Indonesia*. 102(Icaf), 85–90. <https://doi.org/10.2991/icafe-19.2019.14>
- Nurlianto, O. & Aswar, K. (2020). *A Conceptual Framework On The Financial Statement Disclosure In Indonesia Local Government*. *Journal Of Economics And Behavioral Studies*, 12, 1–5.
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2017). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Info Artha*, 1, 97–110. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.72>
- Ramdhani, D. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Propinsi Banten*. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 146–161. <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4301>
- Rusherlistyani, R., & Heriningsih, S. (2013). *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pekalongan*, 13(2), 5157.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012a). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Setyowati, L. (2016). *Determinan Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Esensi*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3120>

Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Indonesia*. *Jurnal Modus*, 30(1), 54–70.